

PENYEDIAAN JARINGAN IRIGASI PERTANIAN BANTU PEMENUHAN AIR PETANI



Sumber Gambar:

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-irigasi/>

Isi Berita:

Krjogja.com - SUKOHARJO- Pemkab dan DPRD Sukoharjo mendukung penuh mewujudkan kedaulatan pangan. Sektor pertanian mendapat prioritas di segala bidang salah satunya terkait jaringan irigasi pertanian. Keberadaanya sangat penting sebagai jaminan pasokan air bagi petani mengairi tanaman padi.

Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, Rabu (1/11) mengatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Sukoharjo membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2024 diketahui sektor pertanian menjadi salah satu pembahasan yang mendapat prioritas. Sebab Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah lumbung pangan yang menjadi andalan pemenuhan kebutuhan beras nasional.

Pemerintah pusat sendiri meminta daerah untuk mewujudkan kedaulatan pangan termasuk di Kabupaten Sukoharjo. Di Sukoharjo dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun pemeliharaan jaringan pertanian tidak teranggarkan, dimana terdapat 26 kelompok tani yg mengusulkan penambahan jaringan irigasi usaha tani (JITUT), 25 kelompok tani yang mengusulkan jalan usaha tani (JUT), 42 kelompok tani yang mengusulkan jaringan irigasi desa (JIDES) dan semua proposal sudah diajukan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan.

Untuk itu, Badan Anggaran merekomendasikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk

menentukan prioritas dari usulan diatas dan agar dianggarkan pada APBD 2024 sebesar Rp 100.000.000,00 per titik sebanyak 18 titik. "Salah satu usaha mewujudkan kedaulatan pangan di Sukoharjo salah satunya dengan penyediaan jaringan pertanian untuk membantu pemenuhan air bagi petani," ujarnya.

Wawan menjelaskan, sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo sudah sangat mendukung seperti tersedianya lahan, petani, sumber air seperti Dam dan embung, bibit padi unggul dan alat pertanian modern. Bentuk dukungan ditambah dengan penyediaan jaringan irigasi.

Jaringan irigasi disediakan untuk membantu petani mempercepat proses pengairan dari sumber air ke lahan pertanian. Sebab di beberapa titik wilayah terdapat sejumlah kendala seperti kerusakan jaringan maupun penyebab lainnya. "Baik dalam bentuk JITUT, JUT, JIDES semuanya harus bisa membantu pengairan pertanian. Petani dibantu agar bisa mewujudkan kedaulatan pangan," lanjutnya.

Wawan mengatakan, selama ini sudah banyak kelompok tani yang mengajukan bantuan JITUT, JUT, JIDES untuk membantu sektor pertanian. Keberadaannya sangat penting mengairi tanaman padi.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Bagas Windaryatno mengatakan, sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo sudah maju dengan hasil panen padi melimpah. Hal ini terlihat dengan keberhasilan surplus beras setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan nasional. Namun demikian, Pemkab Sukoharjo tetap memperhatikan terkait jaringan irigasi untuk mempercepat proses pencarian lahan pertanian.

"Permasalahannya ada jaringan irigasi yang rusak atau justru di wilayah tertentu belum ada jaringan irigasi. Penyebabnya bervariasi karena termakan usia atau memang disana belum ada sumber air. Terpenting juga terkait status kewenangan jaringan irigasi tersebut sebab ada yang jadi tanggungjawab pusat," ujarnya.

Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo memastikan di sektor pertanian yang menjadi kewenangan daerah prosesnya akan dipercepat. Salah satunya terkait penyediaan maupun perbaikan jaringan irigasi.

"Pemkab Sukoharjo memiliki komitmen tinggi dibidang pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan," lanjutnya. (Mam)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/klaten/1243208300/penyediaan-jaringan-irigasi-pertanian-bantu-pemenuhan-air-petani>, "Penyediaan Jaringan Irigasi Pertanian Bantu Pemenuhan Air Petani", tanggal 1 November 2023.

2. <https://www.harianmerapi.com/news/4010711182/penyediaan-jaringan-irigasi-pertanian-bantu-pemenuhan-air-petani-untuk-wujudkan-kedaulatan-pangan>, “Penyediaan Jaringan Irigasi Pertanian Bantu Pemenuhan Air Petani untuk Wujudkan Kedaupatan Pangan”, tanggal 1 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Badan Anggaran merekomendasikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk menentukan prioritas dari usulan diatas dan agar dianggarkan pada APBD 2024 sebesar Rp 100.000.000,00 per titik sebanyak 18 titik. Hal tersebut sebagai salah satu usaha mewujudkan kedaulatan pangan di Sukoharjo salah satunya dengan penyediaan jaringan pertanian untuk membantu pemenuhan air bagi petani.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*